

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

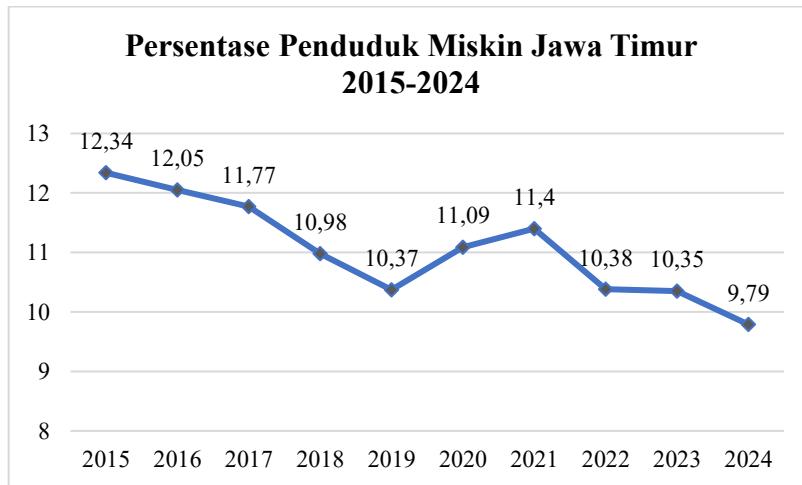
Kemiskinan masih menjadi suatu isu kompleks di Indonesia. Kemiskinan adalah kondisi dimana adanya individu atau kelompok masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Seseorang dianggap miskin jika pendapatannya terlalu rendah untuk menutupi biaya hidup pokoknya yang dimana ditentukan oleh pengeluaran perkapita (Badan Pusat Statistik, 2022). Kemiskinan bukan hal yang baru bagi Indonesia dan merupakan suatu permasalahan untuk negara-negara di seluruh dunia khususnya bagi negara yang sedang berkembang. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia yang menempati peringkat ke-90 dari 100 negara termiskin di dunia seperti yang disampaikan oleh Dana Moneter Internasional (Ventura, 2024). Peringkat ini ditentukan berdasarkan Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita, yang mencakup pendapatan domestik serta hasil dari luar negeri seperti investasi asing.

Kemiskinan tidak disebabkan oleh satu alasan tunggal, melainkan muncul dari banyak penyebab yang saling terkait dan memengaruhi. Kemiskinan tidak hanya dinilai berdasarkan pendapatan, namun meliputi berbagai dimensi kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap layanan dasar. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa pada September 2024 sebesar 8,57% atau sekitar 24,06 juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, menunjukkan bahwa walaupun terdapat peningkatan dalam pengurangan angka kemiskinan, tantangan masih tetap ada.

Angka kemiskinan memiliki peran yang penting bagi pertumbuhan suatu negara. *Pertama*, sebagai landasan bagi penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan nasional, termasuk kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan sektoral. *Kedua*, digunakan dalam menetapkan tujuan berdasarkan lokasi geografis yang menjadi sasaran program pembangunan. *Ketiga*, menentukan bagaimana dana akan didistribusikan untuk kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.

Keempat, berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan program pembangunan seperti pencapaian RPJMN/RPJPN ataupun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Kelima*, angka kemiskinan merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah pusat dan nasional. Meskipun indikator pendahulu tersedia sebelum tingkat kemiskinan, pemerintah belum memiliki alat atau format yang konsisten untuk memprediksi tingkat kemiskinan pada masa waktu tertentu di era mendatang.

Hal ini menggarisbawahi perlunya mengembangkan model prediksi kemiskinan untuk menilai keberhasilan tindakan pengentasan kemiskinan dan mengantisipasi potensi peningkatan angka kemiskinan (Nugroho et al., 2020). Model prediksi ini berfungsi untuk memantau keberhasilan sekaligus mengidentifikasi risiko meningkatnya angka kemiskinan di masa depan. Maka dari itu, perlu adanya pendekatan yang serius dengan menyertakan bermacam pihak dan bidang untuk mengatasi kemiskinan tersebut.



Gambar 1. 1 Presentase Masyarakat Miskin di Jawa Timur Tahun 2015-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2025

Kemiskinan di Jawa Timur menjadi suatu permasalahan yang kompleks dan berkelanjutan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Meskipun Jawa Timur adalah salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, ketimpangan dan tingkat kemiskinan tetap menjadi tantangan besar. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 presentase masyarakat miskin di Jawa Timur mencapai 9,79%, yang menunjukkan bahwa lebih dari 3 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Faktor penyebab kemiskinan di Jawa Timur sangat beragam, termasuk rendahnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan kurangnya infrastruktur yang memadai. Selain itu, bencana alam seperti kekeringan dan banjir yang sering terjadi di beberapa daerah juga berkontribusi terhadap meningkatnya angka kemiskinan, mengakibatkan hilangnya mata pencaharian dan aset masyarakat.

Selama bertahun-tahun, Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam menciptakan berbagai kebijakan dan program perlindungan sosial untuk

memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan dari kemiskinan absolut. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan bantuan sosial kepada masyarakat. Kementerian Sosial menyatakan bahwa bantuan sosial adalah bantuan jangka pendek yang dibagikan kepada masyarakat miskin untuk membantu mereka mencapai perbaikan hidup yang wajar.

Salah satu unsur program jaminan sosial adalah program bantuan sosial, yang merupakan sarana pemerintah pusat dan daerah untuk memenuhi kewajibannya dalam mengurus masyarakat miskin dan terlantar di tingkat bawah. Program ini adalah wujud pelaksanaan Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang mengamanatkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Selain itu pada Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengadakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi anak fakir miskin dan anak terlantar sebagai wujud tugas negara dalam memastikan tercapainya kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu (Rahmansyah et al., 2020).

Pemerintah Indonesia telah melahirkan berbagai program yang memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Program bantuan sosial di Indonesia yang dimaksud yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memiliki

perbedaan dari segi sasaran, bentuk bantuan, dan tujuan. Berikut perbedaan utama di antara masing-masing program.

Tabel 1. 1 Perbedaan Program Bantuan Sosial

Program	Sasaran	Bentuk Bantuan	Syarat	Tujuan
Program Keluarga Harapan	Keluarga miskin dengan kebutuhan khusus	Bantuan tunai bersyarat	Memenuhi syarat kesehatan dan pendidikan	Mengurangi kemiskinan antar generasi
Program Indonesia Pintar	Anak sekolah dari keluarga miskin	Dana pendidikan	Terdaftar di sekolah formal/nonformal	Mengurangi putus sekolah dan mendukung pendidikan
Program JKN – KIS	Seluruh warga, fokus pada kelompok miskin	Layanan kesehatan bersubsidi/gratis	Terdaftar di BPJS Kesehatan	Akses kesehatan universal untuk semua
Bantuan Pangan Non Tunai	Keluarga miskin dan rentan	Kartu elektronik untuk pangan	Tidak ada syarat khusus	Memenuhi kebutuhan pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2018

Secara keseluruhan, perbedaan terletak pada sasaran, bentuk bantuan, syarat penerimaan, dan tujuan yang akan didapatkan. Masing-masing program dirancang untuk mengatasi aspek berbeda dari kemiskinan dan ketimpangan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga akses pangan. Sinergi dari berbagai program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan secara menyeluruh, membantu masyarakat miskin keluar dari keterbatasan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup masyarakat di seluruh Indonesia. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan untuk mengentaskan kemiskinan.

Meskipun menghadapi tantangan dalam pengentasan kemiskinan, pemerintah harus berupaya menguranginya khususnya di wilayah daerah.

Kota Mojokerto merupakan salah satu wilayah yang ada di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 20,21 km². Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2025, jumlah masyarakat miskin di Kota Mojokerto sebanyak 7,43 ribu jiwa. Angka ini tetap substansial apabila dibandingi dengan jumlah total penduduk Kota Mojokerto sebesar 141,43 ribu jiwa. Artinya sebesar 5,57% penduduk Kota Mojokerto merupakan penduduk miskin. Mengacu pada data BPS Kota Mojokerto, persentase penduduk miskin di Kota Mojokerto sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Presentase Masyarakat Miskin Kota Mojokerto

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Masyarakat Miskin	Persentase
2020	132.434	8,09	6,24
2021	133.272	8,37	6,39
2022	134.350	7,88	5,98
2023	135.414	7,65	5,77
2024	141.430	7,43	5,57

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2025

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa presentase masyarakat miskin di Kota Mojokerto mengalami kenaikan di tahun 2021 dikarenakan pandemi di Indonesia dan kemudian pada tahun 2022 hingga 2024 mengalami penurunan secara terus menerus. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Mojokerto telah melakukan inisiatif dalam rangka mengentaskan kemiskinan di wilayah tersebut, di antaranya dengan Program Bantuan Pangan Non Tunai.

Bantuan Pangan Non Tunai adalah program sosial pemerintah yang memberikan bantuan non-tunai setiap bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat melalui sistem rekening elektronik, khusus untuk pembelian bahan pangan dari pedagang pangan yang bekerjasama atau e-warong yang berafiliasi dengan

perbankan (Laurentcia & Yusran, 2021). Program BPNT dimulai sejak awal tahun 2017 dengan memberikan bantuan sebesar Rp 1,7 triliun yang ditujukan kepada 1.286.194 keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai di Indonesia (Djaenal et al., 2021).

Program BPNT dirancang untuk meringankan tanggungan keuangan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan memenuhi kebutuhan pangan, menyediakan gizi yang lebih seimbang bagi penerima, dan mendorong tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Susitanable Development Goals/SDGs*). Penyaluran BPNT secara non tunai dirancang agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efisien, sehingga penerima manfaat dapat menerimanya secara tepat sasaran, dengan waktu, jumlah, kualitas, dan administrasi yang tepat, sehingga meningkatkan upaya untuk mempromosikan inklusi keuangan sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Program Bantuan Pangan Non Tunai berfungsi sebagai pengganti program Beras Sejahtera atau biasa disebut sebagai RASTRA dan bantuan yang diberikan melalui program BPNT tidak bisa disalurkan dalam bentuk tunai, melainkan hanya bisa dicairkan di e-warong yang ditetapkan dengan bahan pangan yang telah ditentukan (Mufatiroh et al., 2021).

Elektronik Warung Gotong Royong atau E-Warong adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian Bahan Pangan oleh Bank (Putra & Putera, 2022). E-Warong merupakan sebuah toko kelontong yang diisi oleh kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan garam serta kebutuhan lainnya. Modal penjualan

didanai secara langsung oleh Dinas Sosial dan hasil dari penjualan akan dibagikan kepada seluruh pegawai E-Warong. Dalam hal ini, E-Warong menawarkan jasa berupa pembagian serta penjualan sembako murah yang berasal dari subsidi langsung dari Pemerintah yang disalurkan oleh Dinas Sosial (Cakti & Budiani, 2022). E-warong berfungsi sebagai fasilitas bagi masyarakat miskin dan rentan untuk memperoleh bantuan pemerintahan dengan kualitas dan standar yang lebih baik, salah satunya melalui program BPNT.

Sebagai salah satu instansi penyelenggara yang bertugas untuk menyalurkan program BPNT, tentu saja Dinas Sosial ingin agar program tersebut dapat terlaksana seefisien mungkin. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa program BPNT masih memiliki sejumlah kesulitan yang menghambat penyaluran dan efektivitasnya. Distribusi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang memengaruhi kelancaran dan ketepatan penerimaannya. Di beberapa daerah terpencil atau pedesaan, infrastruktur transportasi yang buruk membuat distribusi bantuan menjadi lebih sulit dan lambat. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran dan sering kali mengakibatkan bantuan tidak diterima tepat waktu oleh keluarga yang membutuhkan.

Program BPNT mengandalkan agen e-warong (warung elektronik) sebagai tempat penyaluran bantuan pangan. Namun, ketersediaan e-warong di daerah tertentu masih sangat terbatas, yang menyebabkan penerima bantuan kesulitan dalam mengakses bahan pangan yang mereka membutuhkan. Di daerah pedesaan, penerima harus menempuh jarak jauh untuk mengakses e-warong, yang mengurangi

efektivitas bantuan. BPNT disalurkan melalui kartu elektronik yang digunakan penerima untuk membeli bahan pangan di e-warong. Namun, sering kali terjadi masalah teknis seperti gangguan pada sistem pembayaran elektronik, kartu yang tidak terbaca, atau saldo yang tidak sesuai. Masalah teknis ini menyebabkan proses penebusan bantuan menjadi terhambat atau bahkan gagal.

Dalam beberapa kasus, penyaluran dana BPNT tidak konsisten atau terlambat, yang menyebabkan penerima bantuan tidak dapat menebus bahan pangan secara tepat waktu. Keterlambatan ini juga sering kali disebabkan oleh masalah administrasi dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak penyalur, seperti bank dan agen e-warong. Pengawasan dalam distribusi BPNT sering kali kurang optimal, sehingga bantuan berpotensi disalahgunakan atau tidak tepat sasaran. Keterbatasan sumber daya di tingkat lokal membuat pengawasan distribusi bantuan sulit dilakukan dengan baik, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi dan memungkinkan adanya penyimpangan dalam proses penyaluran bantuan.

Wilayah Kota Mojokerto terbagi menjadi 18 kelurahan dan 3 Kecamatan yang dimana pemerintah Kota Mojokerto telah menyalurkan bantuan pangan non tunai kepada 3.500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT di setiap bulannya. Berdasarkan dengan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Mojokerto Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai Kota Mojokerto, bantuan tersebut bernilai 150.000 berupa 10 kilogram beras dan setengah kilogram telur ayam yang disalurkan melalui 13 e-warong yang tersebar di 3 kecamatan kota Mojokerto. Berikut data penerima BPNT di Kota Mojokerto:

Tabel 1. 3 Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Mojokerto

No.	Kecamatan	BPNT	Persentase
1.	Kranggan	978	27,9
2.	Magersari	1407	40,2
3.	Prajurit Kulon	1115	31,8
	Jumlah	3500	100

Sumber : Dinas Sosial Kota Mojokerto, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Magersari memiliki jumlah penerima bantuan sebanyak 1.407 KPM. Besarnya jumlah penerima tersebut menuntut peningkatan fokus dalam pelaksanaan program BPNT bagi Keluarga Penerima Manfaat agar dukungan yang diberikan sesuai dengan harapan sebelumnya.

Di Kota Mojokerto, BPNT diimplementasikan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan, mendorong pemberdayaan ekonomi lokal, mempercepat penurunan *stunting*, dan pengendalian inflasi lokal. Namun pelaksanaan program BPNT di kota Mojokerto masih menghadapi berbagai permasalahan. Bridgman dan Davis dalam Mohi et al., (2018) menyatakan bahwa dalam pengukuran evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan 4 faktor, yaitu *input, process, outputs, dan outcomes*.

Berdasarkan laporan Dinas Sosial Kota Mojokerto, terdapat beberapa masalah terkait data penerima manfaat yang sering kali tidak akurat, keterlambatan dalam penyaluran dana BPNT juga menjadi kendala, sehingga bantuan tidak diterima tepat waktu oleh penduduk yang memerlukan. Hal ini kemudian diperkuat dengan informasi yang didapatkan dalam portal berita *online* suaramojokerto.com yang memuat informasi mengenai masyarakat yang belum terima kartu:

“...sebanyak 549 keluarga penerima manfaat KPM di kota Mojokerto belum menerima kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), karena pihak

perbankan yakni BNI selaku pembuat kartu belum menyelesaikan tugasnya. Dampaknya yaitu tidak bisa menerima bantuan sosial yang seharusnya bisa mereka terima sejak awal tahun..."

(Sumber: <https://suaramojokerto.com/20180316/bank-lamban-594-warga-kota-mojokerto-belum-terima-kartu-e-wallet/>, diakses pada 30 Juni 2025)

Permasalahan ini termasuk kedalam kriteria evaluasi menurut Bridgman dan Davis dalam kriteria *input*. Berdasarkan hasil penelitian menegenai BPNT oleh Faridah et al. (2023) yang menyatakan bahwa dalam implementasinya sarana dan prasarana belum memadai atau masih kurang sehingga mengakibatkan keterlambatan yang dimana hal ini selaras dengan yang terjadi di Kota Mojokerto. Terdapat keluarga penerima manfaat yang belum memiliki kartu karena keterlambatan pihak perbankan sehingga hal ini berkaitan dengan sumberdaya manusia dan sumber daya pendukung yang dibutuhkan dalam melaksanakan program Bantuan Pangan Non Tunai.

Menurut Bridgman dan Davis, tahapan proses dalam evaluasi harus mampu menunjukkan seauh mana impelmentasi program berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan, termasuk koordinasi aktor-aktor dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan. Namun, berdasarkan temuan Rosita et al. (2024), terdapat bantuan yang masih menghadapi permasalahan dalam tahap implementasi terutama terkait ketepatan waktu dan mekanisme penyaluran. Hal ini sejalan dengan hasil pratenitian yang menunjukkan bahwa masyarakat penerima BPNT mengeluhkan waktu pencairan yang terkadang terdapat keterlambatan. Selain itu, terdapat kendala teknis pada penggunaan kartu elektronik yang menyebabkan sebagian penerima kesulitan mengakses bantuan:

“...pencairan BPNT siang tadi sempat terkendala gangguan pada mesin EDC (electronic data capture) dari bank BNI. Antrean para penerima bansos ini mencapai ratusan orang dan bisa dibenahi setelah dua jam lebih...”

Sumber: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3598976/572-keluarga-miskin-di-kota-mojokerto-belum-terima-bantuan-sosial>, diakses pada 30 Juni 2025)

Pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Pangan Non Tunai tidak berjalan dengan semestinya dan menyebabkan keterlambatan sehingga permasalahan ini termasuk kedalam kriteria evaluasi menurut Bridgman dan Davis dalam kriteria *process*.

Dalam tahap evaluasi juga melihat outputs dan outcomes dari kegiatan program tersebut. Namun dalam implementasinya berdasarkan hasil penelitian Saputri et al. (2024) program BPNT masih ada keluhan mengenai besaran bantuan yang dirasa tidak mencukupi serta harga pangan yang tidak sesuai dengan standar.

“dapat beras 10 kilo, memang masih kurang untuk kebutuhan keluarga...”

Sumber:<https://gemamedia.mojokertokota.go.id/berita/15421/2024/08/bpnt-apbd-juli-cair-serentak-mas-pj-tinjau-e-waroeng>, diakses pada 14 November 2025)

Hasil dari program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Magersari menggambarkan situasi di mana bantuan pangan yang diberikan melalui program sosial tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima sehingga dalam hal ini kriteria *output* tidak berkorelasi dengan pengurangan kemiskinan. Begitu juga yang disampaikan dalam penelitian (Syukur et al., 2025) bahwa hasil dari program dapat mencerminkan dampak dan manfaat yang dirasakan oleh Keluarga Penerima Manfaat namun dalam pelaksanaan kegiatan dikatakan kurang efektif yang dilihat dari warga penerima bantuan merasakan manfaat tetapi masyarakat masih kurang puas dengan jumlah bantuan yang diberikan.

Begitu juga terdapat keinginan pemerintah Mojokerto untuk menurunkan jumlah penerima BPNT sehingga masyarakat yang pra menjadi sejahtera, seperti yang tertulis dalam portal berita *online* suaramojokerto.com berikut:

“...kita ingin jumlah penerima BPNT nanti menurun, artinya masyarakat yang pra menjadi sejahtera sehingga program bantuan nanti kita arahkan ke pemberdayaan..

Sumber: <https://suaramojokerto.com/20190717/kunjungi-e-warong-wali-kota-mojokerto-ingin-warga-pra-jadi-sejahtera/>, diakses pada 30 Juni 2025)

Namun pada kenyataannya, jumlah penerima bantuan pangan non tunai yang berada di Kota Mojokerto bertambah sebagaimana yang tertulis dalam tabel 1.3 serta diperkuat dengan informasi yang didapatkan dalam portal berita *online* radarmojokerto berikut:

“Penambahan pagu BPNT telah direalisasikan sejak akhir September lalu. Dari semula berjumlah sekitar 2.500 KPM, saat ini meningkat menjadi 3.500 KPM”

Sumber:<https://radarmojokerto.jawapos.com/politik-pemerintahan/825212859/pemkot-tambah-kuota-bpnt-apbd-meningkat-jadi-3500-keluarga-penerima-manfaat>, diakses pada 30 Juni 2025)

Kedua permasalahan ini termasuk kedalam kriteria evaluasi menurut Bridgman dan Davis dalam kriteria outcomes. Hal ini berkaitan dengan adanya jumlah penerima yang meningkat setiap tahunnya dan program yang belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat juga catatan penting dari perspektif lain yang disampaikan oleh Nurofik, Kolopaking, dan Hartoyo dalam penelitian BPNT di Kota Mojokerto yang dilakukan tahun 2022 yaitu terdapat laporan dari warga mengenai BPNT yang disebabkan oleh ketidakpastian kriteria penerima bantuan sosial serta perlunya melakukan penelitian lanjutan mengenai efektivitas e-warong sebagai pemberdayaan masyarakat miskin (Nurofik et al.,

2022). Hal ini juga dapat dibuktikan dengan hasil aduan masyarakat pada Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kota Mojokerto berikut:

Tabel 1. 4 Jumlah Ajuan Penduduk Pada SLRT Tahun 2023-2025

Jenis Ajuan	2023	2024	2025
Bantuan Pangan Non Tunai	778	1.140	400
Program Indonesia Pintar	464	866	294
Program Indonesia Sehat	37	31	1
Bantuan Lansia	119	378	185

Sumber: Dinas Sosial Kota Mojokerto, 2025

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah mekanisme pelayanan yang berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan melalui profil yang tercatat dalam daftar penerima manfaat dan menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka (Sa'idah & Prabawati, 2019). Berdasarkan tabel diatas, terdapat jumlah ajuan BPNT yang terbanyak dalam 3 tahun terakhir. Hal ini menyampaikan apabila program BPNT belum tepat sasaran dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Mojokerto sehingga banyak sekali ajuan dari masyarakat.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Magersari adalah adanya jumlah penerima bantuan pangan non tunai yang berada di Kecamatan Magersari lebih banyak dibandingkan dua kecamatan lainnya yaitu 40,2% dari total jumlah seluruh penerima. Begitu juga dengan tempat penyaluran program BPNT di Kota Mojokerto melalui 13 e-warong, berikut data ke 13 e-Warong tersebut :

Tabel 1. 5 Lokasi E-Warong di Kota Mojokerto

No.	Kelurahan	Kecamatan
1	Kranggan	Kranggan
2	Meri	Kranggan
3	Muji	Kranggan
4	Purwotengah	Kranggan

5	Gunung Gedangan	Magersari
6	Kedundung	Magersari
7	Kedundung	Magersari
8	Wates	Magersari
9	Blooto	Prajurit Kulon
10	Mentikan	Prajurit Kulon
11	Prajurit Kulon	Prajurit Kulon
12	Pulorejo	Prajurit Kulon
13	Surodinawan	Prajurit Kulon

Sumber : Dinas Sosial Kota Mojokerto, 2025

Berdasarkan data tersebut, Kecamatan Magersari memiliki lokasi e-warong dengan jumlah yang sama dengan Kecamatan Kranggan dan memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan Kecamatan Prajurit Kulon. Selain itu, terdapat beberapa alasan yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan BPNT di wilayah Kecamatan Magersari seperti masyarakat tidak langsung mengambil komoditas ataupun KPM mengambil di luar e-warong. Adapun hal ini diyakini dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak Dinas Sosial, sebagai berikut:

“...Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan BPNT khususnya di Kecamatan Magersari dimana komoditas yang ada tidak langsung diambil sehingga mengakibatkan kerugian di e-warong. Selain itu, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) beberapa kali melakukan pelanggaran seperti mengambil bantuan di luar e-warong...” (Hasil wawancara, 11 Juni 2025)

Kondisi ini menjadi suatu yang penting untuk dicermati karena apabila persoalan tersebut tidak cepat dilakukan evaluasi dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru dan tidak akan tercapainya tujuan awal program bantuan pangan non tunai. Dengan demikian, berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti berminat untuk mengangkat judul **“Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berbasis E-Warong Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Magersari Kota Mojokerto”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana evaluasi program bantuan pangan non tunai dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Magersari Kota Mojokerto?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi program bantuan pangan non tunai dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menghasilkan luaran dan dampak yang menguntungkan baik secara teoritis maupun praktis dalam kaitannya dengan kajian administrasi publik. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi banyak pemangku kepentingan dalam meningkatkan pemahaman dan keahlian mereka khususnya di bidang administrasi publik, menambah pengetahuan dan wawasan yang dapat menjadi tolak ukur bagi penelitian selanjutnya khususnya terkait evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat akademis dengan menambah referensi bacaan dan juga sebagai referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dalam manfaat praktis penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi dan bahan referensi bagi masyarakat luas, khususnya para penerima dan pendamping sosial program. Begitu juga dengan Dinas Sosial Kota Mojokerto, hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai evaluasi atau fokus khusus agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas tepat administrasi sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Keluarga Penerima Manfaat.